BAB II

PELAKSANAAN PKL

2.1 Kegiatan PKL

Aktivitas atau kegiatan PKL yang dilaksanakan penulis selama 25 hari terhitung dari 05 Juli 2010 – 05 Agustus 2010 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jln. RE. Martadinata No. 54, Bandung tepatnya di bagian Humas dengan waktu kerja setiap hari Senin – Jumat, pukul 08.00 – 16.00 WIB. Kegiatan selama PKL disesuaikan dari pengarahan yang diberikan pembimbing yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab penulis untuk melaksanakannya.

Cakupan kegiatan selama PKL antara lain membuat keliping pers dari surat kabar harian lokal, mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen, mencatat surat masuk ke dalam agenda tahunan Penkum, memasukan surat dinas masuk ke dalam arsip tahunan Penkum, mengecek surat masuk Penkum di agenda tahunan, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Berikut kegiatan harian yang dilakukan :

No	Hari/Tgl	Kegiatan	Sifat	
			Rutin	Insidentil
1	Senin 05/07/2010	Pengarahan dari pembimbing dan perkenalan dengan praktisi Humas dan beberapa karyawan.		✓

2	Rabu 07/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
3	Kamis 08/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
4	Jumat 09/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mencatat surat dinas masuk ke dalam agenda tahunan penkum.	✓	
5	Senin 12/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mencatat surat dinas masuk ke dalam agenda tahunan penkum.	✓	
6	Selasa 13/07/2010	Mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
7	Rabu 14/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Memasukan surat dinas masuk ke dalam arsip tahunan Penkum.	✓	
8	Kamis 15/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
9	Jumat 16/07/2010	Memasukan dan memindahkan surat masuk Penkum dan Humas ke dalam arsip tahunan.	✓	

10	Senin 19/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mengantar surat kebagian Sospol dan Asisten Intelijen.		✓
		Mendata surat masuk Penkum di agenda tahunan.	✓	
11	Selasa 20/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mencatat surat dinas masuk ke dalam agenda tahunan penkum.	✓	
12	Rabu 21/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
13	Kamis 22/07/2010	Mendokumentasikan acara ulang tahun Kejaksaan Tingi Jawa Barat yang ke-50.		✓
14	Jumat 23/07/2010	Mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
15	Senin 26/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
		Mengikuti proses dialog antara pihak Kejati Jabar dengan massa pendemo GMBI		✓
16	Selasa 27/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	

17	Kamis 29/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
18	Jumat 30/07/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
		Mencatat surat dinas masuk ke dalam agenda tahunan penkum.	✓	
19	Senin 02/08/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
		Mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen.	✓	
		Mencatat surat dinas masuk ke dalam agenda tahunan penkum.	✓	
20	Selasa 03/08/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
21	Rabu 04/08/2010	Mengkliping surat kabar dari harian lokal.	✓	
22	Kamis 05/08/2010	Mendistribusikan hasil keliping pers ke ruang asisten intelijen.		

Tabel 2.1 : Penjelasan kegiatan harian

2.2 Deskripsi Kegiatan Selama PKL

2.2.1 Deskripsi Kegiatan Rutin Selama PKL

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, antara lain sebagai berikut :

- **Mengkliping dan Dokumentasi Surat Kabar Harian Lokal**

Kliping merupakan satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan berdasarkan pandangan para jurnalis. Biasanya kliping dikumpulkan dari media cetak seperti Koran, tabloid, atau majalah.

Fungsi kliping adalah sebagai acuan bagi para top management dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan yang menyangkut publik utama organisasi. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana pihak media memandang kinerja perusahaan kita dan sekaligus ukuran opini public terhadap perusahaan.

Selama PKL aktivitas rutin yang lakukan oleh Penulis di setiap harinya adalah Mengkliping dan Dokumentasi surat kabar harian lokal. Pembutan kliping ini berupa berita mengenai masalah-masalah yang ditangani Kejaksaan. Demi kemudahan dalam pencarian arsip, maka selayaknya berita yang memang dibutuhkan oleh Penkum Humas sewaktu-waktu dapat dicari dengan mudah. Berita masih tetap seputar masalah yang tengah ditangani atau bahkan yang akan

ditangani. Proses kegiatan pengklipingan bersumber dari surat kabar dari berbagai media cetak diantaranya adalah :

1. Kompas
2. Pikiran Rakyat
3. Republika
4. Tribun Jabar

Cara pendokumentasian berita berdasarkan urutan Media cetak – Hari – Tanggal – Bulan – Tahun – Judul – Halaman – Kolom.

Dokumentasi dan kliping merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan menelaah, menganalisis dan kemudian mengevaluasi perkembangan dari kemajuan Instansi, aktivitas dan program acara tertentu. Dokumentasi adalah kegiatan menghimpun, mengelola, meyeleksi dan menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentang suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. Sedangkan bentuk keliping adalah kegiatan memilih, menggunting dan menyimpan. (Ruslan, 2003:207).

Mengkliping dan mendokumentasi surat kabar ini berupa berita atau kegiatan masalah-maslah yang sedang ditangani Kejaksaan yang muncul pada berbagai media cetak. Pelaksanaan kegiatan ini terhitung setiap hari, dimana media cetak itu terbit maka secepat mungkin untuk dikeliping, mendokumtasikannya dan membuat resume dari hasil keliping tersebut.

Mengkliping dan Dokumentasi surat kabar dari harian lokal adalah kegiatan yang dikembangkan oleh Humas Kejati Jabar, untuk mengumpulkan

berbagai informasi yang berkaitan dengan Kejaksaan (lembaga pemerintahan) dengan cara membaca, menggunting, atau atau menyimpan dari berbagai media kemudian mengelompokan informasi tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan maksud untuk menyeragamkan penyusunan keliping di setiap unit kerja yang menerbitkan keliping berita dan membuat resume atau ringkasan berita yang perlu diketahui oleh Kejaksaan.

Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan pengkelipingan surat kabar harian lokal supaya untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat atau khalayak setiap saat dengan cara memantau melalui berbagai media massa yang ditunjukan sebagai acuan tentang seputar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selain itu, fungsi dari pengkelipingan yaitu didokumentasikan agar apabila terjadi kejadian di masyarakat yang menimbulkan citra negatif, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bisa dengan segera merubah citra negatif menjadi citra positif.

Adapun Contoh kliping dari berita yang di ambil dari surat kabar sebagai berikut :

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L.R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (Pikiran Rakyat) (~~Kompas~~) (Republika) (Tribun Jabar)		
Hari	: (~~Senin~~) (~~Selasa~~) (Rabu) (~~Kamis~~) (Jum'at)		
Tanggal	: 21		
Bulan	: Juli	Tahun	: 2010
Halaman	: 20	Kolom	: 2 s/d 3
Topik	: (~~Kejagung~~ / ~~Kejaksaan~~) (Kejati & Kejari) (~~Persidangan~~)		

Kejari Bale Bandung Usut Dua Kasus Korupsi

SOREANG, (PR).-

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung menyidik dua kasus baru terkait dengan dugaan korupsi di Kab. Bandung. Meski belum menahan tersangka, Kejari Bale Bandung terus mengumpulkan bukti agar bisa melimpahkan kedua kasus itu ke pengadilan.

Kepala Kejari Bale Bandung Yuqaiyum H., didampingi Kasi Intel D.B. Susanto dan Kasi Pidana Khusus Dody Budi K., ketika ditemui di Kantor Kejari Bale Bandung, Jln. Jaksa Naranata, Kec. Baleendah, Selasa (20/7), mengatakan, kasus pertama melibatkan aparat Desa Sukasari, Kec. Pameungpeuk, berinisial AS (60). Ia diduga menggelapkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Kec. Pameungpeuk.

"Seharusnya, anggaran yang turun dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten disalurkan langsung kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat (pokmas), tetapi tersangka AS berupaya agar pembangunan dilakukan melalui dirinya," ucap Yuqaiyum.

Setelah ditelusuri, pembangunan yang dikoordinasikan oleh AS tidak sesuai dengan standar peruntukan. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan AS sedikitnya Rp 350 juta.

Kejari Bale Bandung juga sedang menyidik dugaan penyimpangan dana pelipatan kertas suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Kerugian yang ditimbulkan sedikitnya Rp 135 juta. "Tersangka yang kini diperiksa berinisial DK, mantan pejabat struktural di KPU Kab. Bandung yang tahun lalu menjabat Ketua Pokja Pelipatan Kertas Suara," ucapnya.

Yuqaiyum menambahkan, sepanjang tahun 2010 ini, Kejari Bale Bandung menangani 827 kasus pidana umum yang dilimpahkan dari Polres Bandung dan Polresta Cimahi. **(A-175)*****

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

Kepada Yth : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
Dari : ASISTEN INTELIJEN.
Nomor : ND- 2853 / O.2.3 / L.3 / 07 / 2010
Tanggal : 26 Juli 2010
Sifat : B i a s a.
Lampiran : -
Perihal : Klipping Pers berjudul : "Kejari Bale Bandung Usut Dua Kasus Korupsi".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Pikiran Rakyat hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 yaitu : "Kejari Bale Bandung Usut Dua Kasus Korupsi", Halaman 20, Kolom 2 s/d 3 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Kejaksaan Negeri Bale Bandung menyidik dua kasus baru terkait dengan dugaan korupsi di Kab. Bandung. Kasus pertama melibatkan aparat Desa Sukasari, Kec. Pameungpeuk, berinisial AS (60), ia diduga menggelapkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Kec. Pameungpeuk. Kejari Bale Bandung juga sedang menyidik dugaan penyimpangan dana pelipatan kertas suara pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden 2009. kerugian yang ditimbulkan sedikitnya Rp. 135 Juta. Meski belum menahan tersangka. Kejari Bale Bandung terus mengumpulkan bukti agar bisa melimpahkan kedua kasus itu ke Pengadilan.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

TEMBUSAN :
ARSIP :

- **Administratif**

Administratif merupakan hal yang berkaitan dengan administrasi. Administrasi merupakan kegiatan dalam usaha yang mencakup penetapan tujuan serta penepatan cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.

Administrasi berasal dari Bahasa Belanda, "*Administratie*" yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut : Clerical works (FX.Soedjadi, 1989).

Administrasi dalam arti luas, berasal dari Bahasa Inggris "*Administration*" yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973).

Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selama melakukan Peraktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat salah satu aktifitas yang dilakukan Penulis yaitu Administrasi. Kegiatan ini setiap hari dilakukan oleh penulis, dimana dalam kegiatan ini Penulis membantu Staf Karyawan dalam tata-tulis menulis/catat mencatat atau mengetik yang setiap

hari dilakukan oleh Staf Karyawan yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat khususnya di bagian Penkum Humas dimana penulis melaksanakan PKL.

Kegiatan Administrasi ini dilakukan untuk lebih mengefektifkan dan mengoptimalisasikan bentuk-bentuk kerjasama dalam upaya membantu kinerja kelangsungan Penkum Humas. Selain itu kegiatan administrasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan setiap keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang dimiliki setiap kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan bersama (organisasi) dan atau tujuan individu.

Pelaksanaan kegiatan administratif pada PKL adalah upaya membantu kinerja kelangsungan Penkum Humas. Dimana kita sebagai bagian dari Kehumasan Kejaksaan Tinggi Senantiasa ikut serta dalam tugas yang ada. Kegiatan administratif yang dilakukan seperti ;

a. Mencatat surat dinas masuk ke dalam agenda tahunan penkum
b. Mendata surat-surat baik surat masuk maupun surat yang keluar dalam arsip map yang telah disediakan
c. Membantu kebutuhan karyawan seperti mengetik.

- **Membantu Melayani Tamu**

Dalam hal ini Penulis membantu melayani tamu yang datang, khususnya tamu yang berkunjung ke bagian Penkum Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Disini Penulis dalam melayani tamu memberikan keramahan pada setia pengunjung yang datang, dan setiap pengunjung memberikan keterangan dari

mana, hendak ke mana dan untuk keperluan apa dia berkunjung. Setiap tamu yang datang dilayani dengan sebaik mungkin dan diberikan tanda pengenal. Dengan melayani tamu sebaik mungkin dapat mengeratkan hubungan baik antara pengunjung yang datang untuk bertamu dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

- **Distribusi Data**

Kegiatan ini mengenai pendistribusian hasil data yang telah di dokumentasikan, maka hasil kliping berita di distribusikan ke rungan Asisten Intelijen untuk di tanda tangani.

2.2.2 Deskripsi Kegiatan Insidentil Selama PKL

Kegiatan insidentil yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, antara lain sebagai berikut :

- **Dokumentasi Kegiatan Acara Ulang Tahun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang Ke-50.**

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia, dokumen merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. (Guba dan Lincoln 1981:228)

Sehubungan dengan memeriahkan hari jadi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang Ke-50, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2010 di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dihadiri oleh Kejari Bandung, Kejari Sukabumi, Kejari Kuningan, Kejari Indramayu, Kejari Cianjur, Kejari Sumber, Kejari Garut, Kejari Ciamis, Kejari Tasikmalaya, Kejari Sumedang, Kejari Bale Bandung, Kejari Banjar, Kejari Subang, Kejari Karawang, Kejari Cirebon, Kejari Purwakarta. Kegiatan ini mengadakan berbagai macam acara diantaranya Perlombaan olahraga serta pemberian hadiah kepada pemenang dari perlombaan tersebut. Kegiatan dokumentasi ini dilakukan hanya sekali saja saat melakukan kerja praktek di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

- **Mengikuti Proses Dialog Antara Pihak Kejati Jabar dengan Massa Pendemo GMBI (Gerakan Masyarakan Bawah Indonesia)**

Kegiatan ini dilakukan Pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2010, dimana 150 orang dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berunjuk rasa di depan PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, menuntut penuntasan kasus korupsi di Jabar. Tujuan mereka berunjuk rasa di Kejati Jabar yang berjarak 300 meter dari PN. Di depan pintu gerbang PN yang dijaga 20 anggota polisi, beberapa orang melakukan orasi. Dalam orasinya mereka menilai penuntasan korupsi di Jabar lamban. Massa menuntut penuntasan kasus korupsi oleh kejaksaan dan

pengadilan. Mereka mencontohkan kasus koruspi seperti temuan BPK yang terkait kebocoran Laporan keuangan pemerintah daerah pada 2007 di 24 kabupaten dan kota, kasus proyek stadion Jalak Harupat, dan kasus dinas pekerjaan umum Kota Bekasi. Setelah berorasi, mereka kemudian menuju Kejati Jabar dengan berjalan kaki. Aksi jalan kaki ini dijaga ketat polisi. Polisi melakukan pagar betis untuk membaut jarak antara massa demonstran dan pengendara lalu lintas. Sehingga meski ada aksi jalan kaki, arus lalu lintas tak tersendat.

2.3 Deskripsi Tentang Humas

Pada Hakekatnya Humas adalah kegiatan komunikasi, kendati agak lain dengan kegiatan komunikasi lainnya, karena ciri hakiki dari komunikasi humas adalah *two ways communications* (komunikasi dua arah / timbal balik). Arus komunikasi timbal balik ini yang harus dilakukan dalam kegiatan humas, sehingga tercipta umpan balik yang merupakan prinsip pokok dalam humas (Rachmandi, 1994:7).

Rachmadi menyebutkan bahwa humas adalah salah satu bidang Ilmu Komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu organisasi satu perusahaan dalam melaksanakan fungsi manajemen. Humas berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua itu bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan

goodwill (kamauan baik) publiknya serta memperoleh opini public yang menguntungkan.

Humas merupakan suatu bentuk usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif. (Ruslan, 2002:8)

Essensi Humas menurut Onong Uchyana Effendy, yang disebutnya sebagai ciri-ciri atau karakteristik Humas :

- Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik.
- Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan ditetapkannya oleh manajemen suatu organisasi.
- Publik yang menjadi sasaran kegitan Humas adalah publik intern dan ekstern.
- Oprasionalisasi Humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. (Yuliantia, 2000:38)

▪ Fungsi Humas menurut Cultip & Center and Canfield Ruslan Rosady dalam bukunya "*Manajemen PR dan Media Komunikasi*", fungsi humas yaitu :

1. Menunjang aktivitas utama manajeman dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajeman organisasi).

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi denga publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, perserpsi, dan tanggapan masyarakat terhadap organiasasi yang diwakilinya atau sebaliknya.
4. Melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama.
5. menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. (2006 : 19).

Sedangkan tujuan Humas adalah menciptakan dan memelihara saling pengertian, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa dimengerti oleh pihka-pihak lain yang turut berkepentingan. Dengan adanya kata ‘saling’, maka itu berarti organisasi juga harus memahami setiap kelompok atau individu yang terlibat dengan khalayak atau publik.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan mengenai peranan humas pada intinya adalah sebagai penghubung perusahaan yang diwakilinya dengan publik, sebisa mungkin terus membina hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, serta menciptakan citra positif bagi perusahaan.

2.4 Analisis Kegiatan Selama PKL

Sebagaimana dengan keilmuan ilmu komunikasi konsentrasi humas. Kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan oleh Penulis di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ditempatkan pada bagian Penkum Humas. Keberadaan humas di sebuah perusahaan mempunyai tujuan yaitu sebagai upaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi antara perusahaan dan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Selain itu Humas juga memiliki fungsi Manajamen dimana Humas menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal maupun ekternal, serta kerjasama suatu organisasi / perusahaan dengan publiknya dan ikut terlibat dalm menagani masalah-masalah datau isu-isu manajemen. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen dalam pencapain tujuan organisasi.

Berdasarkan hal diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan aktivitas Humas yang dijalankan organisasi adalah membangun pemahaman publik terhadap organisasi sehingga dapat terbangun hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya dan terpelihara pulalah citra organisasi tersebut.

Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat posisi Humas memegang peranan penting dalam meningkatkan citra lembaga dan mengatur publik intern maupun extern, kegiatan Humas Kejati Jabar dilaksanakan sesuai dengan PR-Excellence

yang terbagi menjadi tiga macam yaitu berkaitan dengan Komunikasi, Media dan Penyuluhan Kesadaran Hukum.

- Komunikasi

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Di dalam kelompok / organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan / karyawan.

Di antara kedua belah pihak harus ada *two-way-communications* atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerja sama tersebut terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial / kebudayaan. Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Kegiatan komunikasi dalam Humas di Kejati Jabar ditunjukan kepada masyarakat yang ada dalam organisasi (internal) dan masyarakat luar organisasi (eksternal). Komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu Komunikasi personal / pribadi dan Komunikasi kelompok. Yang penting untuk memberi pengertian bahwa

komunikasi dalam Humas, sentral dan mempunyai peranan penting dalam pencapain tujuan yang telah ditentukan.

Dewasa ini teknologi berkembang begitu pesat, maka interaksi antara anggota masyarakat semakin meningkat jangkauannya dan bertambah luas. Maka komunikasi tatap muka dan melalui media massa sekarang ini lebih dipakai secara terpadu guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Organisasi modern memiliki struktur yang kompleks dari berbagai ragam kegiatan khusus. Hanya dengan komunikasilah kegiatan-kegiatan itu dapat diatur dan dipersatukan untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan pentingnya peranan komunikasi itu dalam pelaksanaan fungsi Humas dalam organisasi secara keseluruhan, maka komunikasi bertindak yaitu berinteraksi dan mempengaruhi seluruhnya. Komunikasi diperlukan untuk membuat organisasi bersatu dan berfungsi. Maka komunikasi adalah tanggung jawab dari setiap orang. Aliran melalui organisasi hanya bisa efektif, jika aliran antara pribadi-pribadi yang membangun organisasi itu juga efektif.

- Media

Humas merupakan salah satu usaha manajemen dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi manajemen itu dengan publiknya. Salah satu kegitan Humas dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik adalah kegiatan Hubungan Pers (*Press Relation / Media Relation*) yakni membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media cetak (surat kabar / majalah) dan media elektronik (tv / radio).

Media komunikasi yang penting digunakan humas adalah dalam kemitraannya dengan media pers (cetak atau elektronik). Dimana Humas di Kejati Jabar mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di daerah, instansi pemerintah, mass media dan masyarakat.

Penting sekali dalam sebuah kegiatan Humas di Kejati Jabar menjalin hubungan pers atau *Media Relation* yang baik dengan para pemimpin dan reporter / wartawan surat kabar, majalah, radio dan televisi. Perlakuan yang berdasarkan *like* dan *dislike* dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita-berita / tulis-tulisan yang tidak akurat, bahkan berita yang tidak benar tentang organisasi / perusahaan itu, yang mungkin dapat membawa kerugian.

Kaitan Humas dengan pers / media massa harus tetap erat, karena Humas tidak dapat meninggalkan pers sebagai sarana informasi publikasi Humas, sebaliknya pers membutuhkan informasi resmi, akurat dan lengkap, biasanya didapatkan dari Humas. Secara tidak langsung Hubungan Humas dan pers saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang bersifat simbiosis. Agar Humas sebagai sumber berita dapat dengan mudah dihubungi dan sebaliknya Humas tidak menemui kesulitan untuk menyampaikan informasi atau membantah / menetralisir berita yang dimuat media massa, maka penting sekali bagi Humas untuk selalu membina hubungan baik dengan pers.

- Penyuluhan Kesadaran Hukum

Salah satu Tugas Humas Kejati Jabar Yaitu Melakukan dan memberikan penyuluhan hukum ke daerah-daerah untuk membimbing masyarakat taat hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka penegakan hukum suatu negara demokrasi yang tertib hukum. Namun disisi lain perlu juga disadari bahwa upaya untuk menciptakan kesadaran hukum bukan suatu hal yang sederhana, sebab hukum sebagai suatu produk sosial yang tidak nyata (*intangible product*) tidak semudah memasarkan sama dengan produk-produk nyata (*tangible product*) yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu format perencanaan komunikasi yang selama ini banyak dikaji dan dikembangkan oleh studi komunikasi pembangunan dapat diaplikasikan dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat yang buta atau kurang memahami tentang hukum.

Pembinaan kesadaran hukum telah ditingkatkan dengan kegiatan penyuluhan hukum, bimbingan, pendidikan dan bantuan hukum. Dengan pertimbangan betapa pentingnya pembinaan kesadaran hukum masyarakat, maka khususnya oleh Kejaksaan telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang dipopulerkan dengan nama Jaksa Masuk Desa. Jangkauan utamanya ialah masyarakat pedesaan yang terpencil dari hubungan komunikasi dan transportasi pada umumnya. Mengingat sasaran kegiatan adalah masyarakat pedesaan yang awam/buta hukum maka teknik dan sistem pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan secara manusiawi dan kemasyarakatan dan bukan pendekatan secara teknis hukum.

Usaha peningkatan tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati hukum dan menghormati hak azasi sesamanya diusahakan pula melalui penyuluhan hukum. Pada hakekatnya kegiatan ini tidak semata-mata ditujukan kepada warga masyarakat di daerah, melainkan juga ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri agar dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan, diantaranya penerangan tentang fungsi dan tugas pengadilan melalui brosur-brosur yang disebarluaskan ke daerah-daerah, penyuluhan pada masyarakat dalam bentuk ceramah, wawancara, di TV/RRI, radio swasta, tempat-tempat umum dan publikasi media cetak lainnya.

Dalam kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) antusias masyarakat sangat besar. Bahkan masyarakat juga mengharapkan agar pelaksanaan Penyuluhan / Penerangan Hukum dalam lingkungannya dapat diulangi kembali. Dari hasil pengamatan dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan / Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) yang diadakan selama ini telah dapat dibina kerjasama yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintah yang terkait yang ada di Daerah Jawa Barat.

Keterpaduan ini secara terus menerus akan diusahakan untuk dapat dibina dan ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum dan kesadaran hukum

masyarakat dalam mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku karena program BINMATKUM adalah program Nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Humas sebagai bagian dari manajemen perusahaan/organisasi, berorientasi pada aktivitas yang dilakukan oleh industri, perusahaan, perserikatan, organisasi sosial, atau jabatan pemerintah, untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan maksud menyesuaikan dirinya pada keadaan sekeliling dan memperkenalkan diri pada masyarakat.

Humas mempunyai tugas menjadi “corong” atau publikasi kepada masyarakat agar citra organisasi tetap baik dan menjadi “mediator” yang menjembatani kepentingan organisasi / perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan Humas itu sendiri. Berbagai aktifitas Humas senantiasa menciptakan, menjaga dan meningkatkan citra yang positif.

Fungsi humas yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan instrumen yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi atau perusahaan, suasana kerja secar kondusif, menjadi terhadap karyawan yang perlu pendekatan khusus, memotivasi dlam kegiatan kinerjanya dll. Penting diperhatikan bahwa dalm Humas, mengingat kembali filsafat, pengertin, sejarah maupun fungsinya, yang menunjukan bahwa Humas berakar pada pola pikir pragmatis dan harmonis, terutama dalam meminimalkan konflik, dengan cara menggunkan pendekatan, komunikasi timbal balik akan sangat membantu menemukan strategi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi.

Humas menyadari bahwa komunikasi yang baik dan etis serta hubungan manusiawi merupakan instrument dalam mengatasi hubungan yang tegang ataupun sampai tejadinya konflik. Hal ini terjadi karena adanya pengertian. Dan dengan komunikasi itu muncul adanya saling pengertian dan kepercayaan. Artinya mengakui bila ada kesalahan, kekeliruan, tetapi menyadari bahwa ada kemungkinan untuk mengadakan perbaikan demi perkembangan dan akan lebih menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini jaminan yang terhandal ialah "saling adanya keterbukaan".

Dalam hal ini seorang Humas dibutuhkan bagi perusahaan (lembaga) guna membangun *image bulding*, karena Humas merupakan alat (fungsi) yang digunakan suatu organisasi dalam menciptakan harmoni atau keseimbangan hubungan (*relations*) antara manajemen dengan publiknya akibat adanya konsekuensi kepentingan kedua pihak yang muncul dalam beinteraksi, dalam menciptakan harmoni ini Humas menggunakan komunikasi sebagai perangkat kerjanya, utamanya komunikasi yang sifatnya timbal balik dan mendorong terwujudnya saling pengertian dan kerjasama.

2.5 Analisis Pelayanan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kepada Mahasiswa PKL

Pelayanan menurut Hartanto (1999:2) yaitu :

> "Upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan/pengunjung berupa pemberian kemudahan, kelancaran, kenyamana serta keamanan kepada pelanggan dari pihak perusahaan. J. P. G Sianipar menyatakan bahwa pelayanan tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik pelayanan akan tetapi meliputi juga dimensi empati yaitu tingkat perhatian dan kepedulian penyedia

jasa atas kepentingan, kebutuhan dan keluhan pelanggan (penerima jasa).” (1999 : 2)

Dari uraian diatas maka hal penting mengenai pelayanan yaitu :

Pertama, pelayanan bersifat tanpa wujud *(intangible*) artinya upaya dari aktifitas pelayanan dapat dirasakan oleh pelanggan yang menerima pelayanan (puas/tidak puas). Kedua, pelayanan dapat berbentuk pemberian kemudahan, kelancaran, kenyamanan, serta keamanan dalam diri pelanggan. Maka dari itu pelayanan pelanggan (*Costumers service*) amat dibutuhkan untuk menjaga kredibilitas suatu perusahaan dan menjaga citra perusahaan semakin meningkat.

Pelayanan yang diberikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penulis baik. Selama melakasanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, penulis merasakan suasana yang cukup menyenangkan, dan karyawan-karyawannya yang ramah walaupun dalam melaksanakan kegiatan rutin, penulis tidak seluruhnya mengerjakan kegiatan yang dilakukan oleh Humas akan tetapi sebagian mengerjakan tugas administrasi yaitu memasukan surat masuk dan surat keluar ke dalam agenda. Penulis pun diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan – kegiatan insidental yang bisanya dilakukan oleh Humas.

Selain itu juga penulis diberikan kesempatan untuk meliputan dan mendokumentasikan kegiatan – kegiatan insidental Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama – sama dengan kedua teman PKL. Bila penulis mengalami kesulitan, hambatan, ataupun hasil yang kurang sempurna maka pihak Humas dan pegawai mengoreksi dari hasil yang telah penulis lakukan, sehingga hal tersebut menjadi

suatu pembelajaran bagi penulis agar dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang, khususnya dalam bidang Humas.

Hasil dari kerja praktek ini adalah memberikan suatu pemahaman yang berarti bagi penulis tentang bagaimana Humas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses komunikasi dengan public internal maupun eksternal lembaga serta dapat membina hubungan baik dengan media.